



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 44 B Telukbetung Utara

Telp. (0721) 470305 Bandar Lampung 53211



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kaharidat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan HidayahNya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan atas usulan dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024, Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung, Arah Kebijakan Pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan serta usulan masyarakat yang berkembang selama proses musrenbang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung baik pada skala Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dari rencana kerja ini diperoleh gambaran mengenai rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama satu tahun kedepan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dan menjadi ukuran keberhasilan sektor perdagangan di Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, Juli 2023

KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730524 199703 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama 1 tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penyusunan Renja.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta telah menyesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung dan telah sesuai dengan arah kebijakan maupun strategi yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2019-2024. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 merupakan Renja untuk tahun kedua dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019-2024. Selanjutnya Renja-OPD akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Lampung tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024 :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjamin kesinambungan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan maupun pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan penyusunan Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada semua pemangku kepentingan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung mengenai rencana kerja satu tahun kedepan sehingga masing-masing pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan dapat melaksanakan tugas dan perannya secara baik.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
3. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi tahapan serta mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana Renja OPD secara paralel digunakan bagi penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2023g.
4. Menjadi ukuran keberhasilan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung dalam hal pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Dokumen Renja

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas Renja, proses penyusunan Renja, pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, dan menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi renja pada pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan yang terdapat dalam renja tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, kemudiaan tujuan serta sasaran renja pada tahun yang akan datang serta rumusan program dan kegiatan guna menunjang tujuan serta sasaran renja yang akan dicapai.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan matriks rencana program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi, indikator, target dan prakiraan maju

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 dan Capaian Renja terhadap Renstra.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2022 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD sebesar Rp. 27.976.329.772,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri 8 (delapan) program pembangunan 18 (delapan belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub-kegiatan.

Tetapi pada perjalanannya kegiatan terjadi penambahan anggaran guna mendukung mekanisme kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.024.525.669,- (satu miliar dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), berdasarkan APBD Perubahan Anggaran 2022 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 29.000.855.441,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 27.747.658.621,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus puluh satu rupiah) atau sebesar 95% dengan sisa anggaran saat ini sebesar Rp. 1.447.972.355,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Berikut uraian realisasi capaian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra.

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	20.048.745.539	0	0	100	18.325.568.031	25	2.714.501.993	25	4.530.786.685	25	4.789.709.658	25	5.002.981.655	100	92,97	100	15.490.154.104	100	77,26	Disperidag.	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan	95	280.000.000	0	0	95	219.794.637	25	56.414.000	20	25.190.000	25	35.778.900	25	101.617.300	100	99,64	95	219.000.200	100	78,21	Disperidag.	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9	150.000.000	0	0	9	106.000.000	3	47.618.000	3	13.270.000	1	10.224.000	2	34.254.000	100	99,40	9	105.366.000	100	70,24	Disperinda g.	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5	130.000.000	0	0	5	113.794.637	4	8.796.000	0	11.920.000	0	25.554.900	1	67.363.300	100	99,86	5	113.634.200	100	87,41	Disperinda g.	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100	15.686.492.539	0	0	100	13.897.458.934	25	2.259.410.819	25	3.821.646.532	25	3.611.103.985	25	3.054.517.301	100	91,72	100	12.746.678.637	100	81,26	Disperidag.	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	15.521.492.539	0	0	12	13.762.458.934	3	2.242.722.819	3	3.800.853.532	3	3.554.507.485	3	3.013.680.801	100	91,64	12	12.611.764.637	100	81,25	Disperinda g.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	12	70.000.000	0	0	12	60.000.000	3	10.000.000	3	9.625.000	3	24.078.100	3	16.296.900	100	100	12	60.000.000	100	85,71	Disperindag.	
3.30.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1	45.000.000	0	0	1	35.000.000	0	-	0	4.790.000	0	16.486.200	1	13.637.800	100	99,75	1	34.914.000	100	77,59	Disperindag.	
3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12	50.000.000	0	0	12	40.000.000	3	6.688.000	3	6.378.000	3	16.032.200	3	10.901.800	100	100	12	40.000.000	100	80,00	Disperindag.	
3.30.01.1.03	Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi BMD	100	50.000.000	0	0	100	34.000.000	20	5.217.000	20	5.443.000	35	14.428.000	25	7.763.000	100	96,62	100	32.851.000	100	65,70	Disperidag.	
3.30.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah	2	25.000.000	0	0	2	17.000.000	0	2.657.000	0	2.512.000	0	6.988.200	2	4.033.800	100	95,24	2	16.191.000	100	64,76	Disperindag.	
3.30.01.1.03.06	Penatausahaan BMD Pada Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan BMD	12	25.000.000	0	0	12	17.000.000	3	2.560.000	3	2.931.000	3	7.439.800	3	3.729.200	100	98,00	12	16.660.000	100	66,64	Disperindag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100	95.000.000	0	0	100	85.184.000	10	1.874.000	25	10.530.000	15	6.290.000	50	62.645.000	100	95,49	100	81.339.000	100	85,62	Disperidag.	
3.30.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Jabatan	2	20.000.000	0	0	2	24.000.000	0	-	1	6.550.000	1	1.600.000	0	15.755.000	100	99,60	2	23.905.000	100	119,53	Disperindag.	
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Diklat	30	75.000.000	0	0	1	61.184.000	0	1.874.000	0	3.980.000	0	4.690.000	1	46.890.000	100	93,87	1	57.434.000	3,33	76,58	Disperindag.	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	95	1.642.253.000	0	0	95	1.563.040.460	10	107.174.000	15	178.357.856	30	508.512.613	40	753.781.418	100	99	95	1.547.825.887	100	94,25	Disperidag.	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Listrik/ Penerangan Kantor	73	45.000.000	0	0	159	27.949.500	40	4.650.000	25	4.650.000	62	11.625.000	32	7.024.000	100	100	159	27.949.000	217,81	62,11	Disperindag.	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Kelompok Barang	590	325.000.000	0	0	6	470.173.888	1	27.000.000	0	10.736.000	3	150.593.000	2	268.153.600	100	97,09	6	456.482.600	1,02	140,46	Disperindag.	
3.30.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	75	47.253.000	0	0	354	40.000.000	0	-	117	20.000.000	0	-	237	19.985.000	100	99,96	354	39.985.000	472	84,62	Disperindag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	60.000.000	0	0	12	64.301.000	3	24.116.000	3	9.937.000	3	19.578.000	3	10.640.000	100	99,95	12	64.271.000	100	107,12	Disperindag.	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Material	2	150.000.000	0	0	2	100.000.000	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000	100	100	2	100.000.000	100	66,67	Disperindag.	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makan dan Minum	60	40.000.000	0	0	50	30.000.000	12	5.000.000	8	5.000.000	18	9.500.000	12	9.900.000	100	98	50	29.400.000	83,33	73,50	Disperindag.	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40	975.000.000	0	0	55	830.616.072	8	46.408.000	9	128.034.856	22	317.216.613	16	338.078.818	100	99,89	55	829.738.287	137,50	85,10	Disperindag.	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan	95	1.575.000.000	0	0	95	1.516.670.000	15	214.413.760	20	296.868.047	30	438.934.422	30	489.132.511	100	94,90	95	1.439.348.740	100	91,39	Disperidag.	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100	475.000.000	0	0	100	274.010.000	25	36.113.760	25	64.568.047	25	59.184.422	25	62.042.511	100	80,99	100	221.908.740	100	46,72	Disperindag.	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pelayanan Umum Kantor	12	1.100.000.000	0	0	12	1.242.660.000	3	178.300.000	3	232.300.000	3	379.750.000	3	427.090.000	100	97,97	12	1.217.440.000	100	110,68	Disperindag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Yang Dilakukan Pemeliharaan	15	720.000.000	0	0	15	1.009.420.000	2	69.998.414	4	192.751.250	3	174.661.738	6	533.525.125	100	96,19	15	970.936.527	100	134,85	Disperidag.	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Terpelihara	9	425.000.000	0	0	14	343.000.000	3	56.498.414	3	35.951.250	4	103.786.738	4	110.692.145	100	89,48	14	306.928.547	155,556	72,22	Disperindag.	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	2	225.000.000	0	0	2	585.000.000	0	-	1	149.800.000	1	49.975.000	0	384.857.980	100	99,94	2	584.632.980	100	259,84	Disperindag.	
3.30.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Kantor Yang Terpelihara	50	70.000.000	0	0	56	81.420.000	14	13.500.000	7	7.000.000	15	20.900.000	20	37.975.000	100	97,49	56	79.375.000	112	113,39	Disperindag.	
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN																							

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	5	520.000.000	0	0	5	575.000.000	0	41.347.000	2	151.905.000	0	47.870.000	3	323.480.000	100	98,19	5	564.602.000	100	108,6	Disperidag.	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Harga Melalui Sistem Informasi	12	390.000.000	0	0	12	375.000.000	0	41.347.000	6	151.905.000	1	47.870.000	5	131.740.000	100	99,43	12	372.862.000	100	95,61	Disperidag.	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pergerakan Harga Bahan Pokok Serta Barang Strategis	1	90.000.000	0	0	1	75.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	18.990.000	1	38.010.000	100	100	1	75.000.000	100	83,33	Disperindag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Harga Pangan Pokok	7	300.000.000	0	0	3	300.000.000	0	32.347.000	2	142.905.000	0	28.880.000	1	93.730.000	100	99,29	3	297.862.000	42,86	99,29	Disperindag.	
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90	90.000.000	0	0	90	200.000.000	0	-	0	-	0	-	90	191.740.000	100	95,87	90	191.740.000	100	213	Disperidag.	
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	8	90.000.000	0	0	6	200.000.000	0	-	0	-	0	-	6	191.740.000	100	95,87	6	191.740.000	75	213	Disperindag.	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Unggulan Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	10	400.000.000	0	0	40	458.000.000	0	-	5	10.624.000	15	114.184.000	20	333.192.000	100	100	10	458.000.000	100	114,50	Disperidag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	45	400.000.000	0	0	170	458.000.000	0	-	10	10.624.000	65	114.184.000	95	333.192.000	100	100	45	458.000.000	100	114,50	Disperidag.	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Negara Tujuan Promosi	17	125.000.000	0	0	10	200.000.000	0	-	0	-	0	-	10	200.000.000	100	100	10	200.000.000	58,82	160	Disperindag.	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir Yang Mengikuti Pelatihan	125	275.000.000	0	0	120	258.000.000	0	-	30	10.624.000	66	114.184.000	24	133.192.000	100	100	120	258.000.000	96,00	93,82	Disperindag.	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Cakupan Barang Beredar Yang Diawasi	20	1.045.000.000	0	0	20	1.054.840.000	0	18.000.000	4	58.229.500	6	384.961.100	10	545.004.800	100	95,39	20	1.006.195.400	100	96,28664	Disperidag.	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pengetahuan Tentang Perlindungan Konsumen	3	75.000.000	0	0	3	142.840.000	0	-	0	1.784.200	3	111.208.200	0	18.007.000	100	91,71	3	130.999.400	100	174,67	Disperidag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaa n Konsumen	1	75.000.000	0	0	1	142.840.000	0	-	0	1.784.200	1	111.208.200	0	18.007.000	100	91,71	1	130.999.400	100	174,67	Disperinda g.	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	1	670.000.000		0	1	799.000.000	0	18.000.000	0	56.445.300	0	246.443.400	1	449.347.300	100	96	1	770.236.000	100	114,96	Disperidag.	
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Verifikasi Mutu Produk	14	70.000.000			10	50.000.000	0	-	0	904.400	8	36.518.200	2	12.577.400	100	100	10	50.000.000	71,43	71,43	Disperinda g.	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pengadaan Sarana Pengujian Laboratorium	4	250.000.000	0	0	7	425.000.000	0	-	2	35.952.300	2	37.111.300	3	339.172.400	100	97,00	7	412.236.000	175,00	164,89	Disperinda g.	
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi Mutu Komoditi	1955	275.000.000	0	0	1915	274.000.000	287	18.000.000	230	19.588.600	1015	163.785.100	383	56.626.300	100	94,16	1915	258.000.000	97,95	93,82	Disperinda g.	
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikasi Kalibrasi	50	75.000.000	0	0	40	50.000.000	0	-	0	-	0	9.028.800	40	40.971.200	100	100	40	50.000.000	80,00	66,67	Disperinda g.	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Ketentuan	20	300.000.000	0	0	20	113.000.000	0	-	0	-	3	27.309.500	17	77.650.500	100	92,88	20	104.960.000	100	34,99	Disperidag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan	35	225.000.000	0	0	11	73.000.000	0	-	0	-	4	27.309.500	7	41.950.500	100	94,88	11	69.260.000	31,43	30,78	Disperinda g.	
3.30.06.1.03.02	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kegiatan Fasilitasi	1	75.000.000			1	40.000.000	0	-	0	-	0	-	1	35.700.000	100	89,25	1	35.700.000	100	47,60	Disperinda g.	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		10	1.250.000.000	0	0	10	1.643.500.000	0	-	0	64.922.000	2	207.737.730	8	1.365.500.000	100	99,68	10	1.638.159.730	100	131,05	Disperidag.	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM Binaan Yang Dipromosikan	20	1.000.000.000	0	0	20	1.290.000.000	0	-	2	64.922.000	3	129.673.230	15	1.091.675.000	100	99,71	20	1.286.270.230	100	128,63	Disperidag.	
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UKM/PKM Yang Dipromosikan	15	1.000.000.000	0	0	10	1.290.000.000	0	-	2	64.922.000	1	129.673.230	7	1.091.675.000	100	99,71	10	1.286.270.230	66,67	128,63	Disperinda g.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM Binaan Yang Mendapatkan Fasilitas	20	250.000.000	0	0	20	353.500.000	0	-	0	-	5	78.064.500	15	273.825.000	100	99,54	20	351.889.500	100	140,76	Disperidag.	
3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah PKM/UKM Yang Ditingkatkan Kualitas Produknya	250	150.000.000	0	0	65	66.000.000	0	-	0	-	45	39.500.000	20	25.000.000	100	97,73	65	64.500.000	26,00	43,00	Disperindag.	
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	100.000.000			1	287.500.000	0	-	0	-	0	38.564.500	1	248.825.000	100	99,96	1	287.389.500	100	287,39	Disperindag.	
3.31	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN																							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	200	6.660.000.000	0	0	650	6.671.947.410	150	438.987.200	50	283.270.500	100	692.810.450	350	5.176.024.932	100	98,79	200	6.591.093.082	100	98,97	Disperidag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Dalam Mendukung Tujuan RPIP	90	6.660.000.000	0	0	90	6.671.947.410	20	438.987.200	10	283.270.500	25	692.810.450	35	5.176.024.932	100	98,79	90	6.591.093.082	100	98,97	Disperidag.	
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri	1	4.000.000.000	0	0	1	1.093.640.000	0	-	0	3.451.900	0	55.887.750	1	1.032.926.996	100	99,87	1	1.092.266.646	100	27,31	Disperindag.	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM Industri Yang Mengikuti Vokasi/Diklat/ Bimtek Pelatihan	120	875.000.000	0	0	30	1.674.453.000	15	358.057.300	2	82.000.000	9	186.446.600	4	1.017.297.976	100	98,17	30	1.643.801.876	25,00	187,86	Disperindag.	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Unit Usaha Industri Yang Menerapkan Standarisasi Industri	60	225.000.000	0	0	20	415.000.000	0	-	0	3.998.400	14	158.325.600	6	249.678.000	100	99,28	20	412.002.000	33,33	183,11	Disperindag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.31.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Yang Mengikuti Vokasi /Diklat/Bimtek/ Pelatihan	400	1.475.000.000	0	0	120	3.338.854.410	18	80.929.900	8	191.820.200	60	218.156.500	34	2.802.375.960	100	98,64	120	3.293.282.560	30,00	223,27	Disperindag.	
3.31.02.1.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	85.000.000	0	0	1	150.000.000	0	-	0	2.000.000	0	73.994.000	1	73.746.000	100	99,83	1	149.740.000	100	176,16	Disperindag.	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Usaha Industri (UI) Besar Yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	25	260.000.000	0	0	25	225.000.000	2	25.086.000	5	57.292.050	8	63.200.000	10	79.362.170	100	99,97	25	224.940.220	100	86,52	Disperidag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
			K	Rp.	K	Rp .	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi IUI Besar	20	260.000.000	0	0	63	225.000.000	6	25.086.000	13	57.292.050	20	63.200.000	24	79.362.170	100	99,97	20	224.940.220	100	86,52	Disperidag.	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sosialisasi Penerbitan IUI	1	135.000.000	0	0	1	125.000.000	0	15.086.000	0	13.282.000	0	35.984.000	1	60.606.450	100	99,97	1	124.958.450	100	92,56	Disperindag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan IUI	7	125.000.000	0	0	11	100.000.000	0	10.000.000	6	44.010.050	4	27.216.000	1	18.755.720	100	99,98	11	99.981.770	157,14	79,99	Disperindag.	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Kab/Kota Yang Masuk SIINAS	45	165.000.000	0	0	45	47.000.000	-	-	10	5.248.000	-	-	35	41.752.000	100	100	45	47.000.000	100	28,48	Disperidag.	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis (SIINAS)	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Industri	12	165.000.000	0	0	12	47.000.000	0	-	2	5.248.000	0	-	10	41.752.000	100	100	12	47.000.000	100	28,48	Disperidag.	
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINAS	Jumlah Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi	2	125.000.000	0	0	2	5.248.000	0	-	0	5.248.000	0	-	2	-	100	100	2	5.248.000	100	4,20	Disperindag.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	1	40.000.000	0	0	1	41.752.000	0	-	0	-	0	-	1	41.752.000	100	100	1	41.752.000	100	104,38	Disperindag.	
Rata-rata Capaian Kinerja %																	100,00	97,68			98,90	105,86		
Predikat Kerja																	sangat baik	sangat baik			sangat baik	sangat baik		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Disperindag Prov. Lampung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja				Urusan
			Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	%	5,8	0,47	8,1	Perindustrian
2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	%	6,3	15,35	243,6	Perdagangan
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	Miliar US\$	3,48	5,60	160,9	Perdagangan
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	%	≤ 1,5	0,91	100	Perdagangan

Dari tabel diatas, dari ke empat indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung hanya indikator kinerja persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan, dimana nilai kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB adalah sebesar 0,47% dari target sebesar 5,8% atau hanya sebesar 8,1%. Sementara indikator kinerja utama lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat hambatan yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk menjalankan tugas pokok serta fungsinya dan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan tugas pokok serta fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan industri kecil menengah dalam penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi, dan diversifikasi produk;
2. Belum optimalnya potensi kerjasama antara IKM dengan perusahaan besar dan BUMN/BUMD, maupun dengan IKM lainnya;
3. Pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Lampung yang harus diantisipasi dengan pembekalan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan dunia industri;
4. Belum terdapatnya kajian/dokumen/informasi yang valid mengenai ketersediaan bahan pokok di pasaran maupun rantai pasok/distribusi dari bahan pangan pokok;
5. Perkembangan teknologi informasi membuat pasar global semakin terbuka menuntut industri menyediakan produk yang adaptif dan inovatif;
6. Belum adanya payung hukum yang jelas tentang pengawasan perdagangan digital (*e-commerce*);
7. Perkembangan *e-commerce* yang belum merata, dimana hanya masih terpusat di kota;
8. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pengetahuan serta keterampilan di dalam pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan;
9. Masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak – haknya;

10. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan lembaga perlindungan konsumen;
11. Meningkatkan efektifitas diversifikasi produk ekspor. Dikarenakan masih tingginya ketergantungan kinerja ekspor terhadap komoditi – komoditi unggulan;
12. Meningkatkan akses informasi pasar ekspor bagi para eksportir.

Berdasarkan hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta dari hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya, maka isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti pada penyusunan Renja tahun 2024 guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan IKM dalam penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi, dan diversifikasi produk;
2. Peningkatan kerjasama/kemitraan IKM dengan Industri Besar maupun BUMD/BUMN;
3. Kesiapan dalam menghadapi industri 4.0;
4. Peningkatan kapasitas lembaga, daya saing, literasi IKM mengenai *e-commerce* dalam menghadapi era ekonomi digital;
5. Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar/jasa dalam usaha meningkatkan perlindungan konsumen;
6. Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah terbentuk dan menginisiasi pembentukan BPSK di tiap kota dan kabupaten;
7. Pengembangan produk ekspor potensial dan inovatif.
8. Peningkatan informasi guna membuka akses pasar ekspor.
9. Pengembangan citra produk/komoditi Provinsi Lampung.
10. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok penting.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan

tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2024 di arahkan pada :

Sasaran Pembangunan Daerah 2019	Indikator	Target Tahun 2024
Sasaran Makro	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
	Inflasi (%)	3 ± 1
	PDRB Per Kapita ADHA (Juta Rupiah)	45 - 46
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 – 3,8
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4 – 10,9
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6 – 70,9
	Indeks Gini	0,293 - 0,314
	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 106
	Pertumbuhan PAD	8,47
	Kemantapan Jalan Provinsi	78
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,29

Berdasarkan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada sasaran pokok dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2019-2024 dan RKP Tahun 2024 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sejalan dengan RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung masih melakukan pembahasan dalam menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 dimana tema pada rancangan saat ini adalah : **“Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”**. Dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Enam prioritas pembangunan tahun 2024 tersebut, diarahkan pula pada pencapaian sasaran pembangunan yang selaras dengan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Rancangan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung harus didiskusikan di dalam Musrenbang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Renja Dinas kabupaten/kota yang membidangi sektor industri dan sektor perdagangan. Sehingga terciptanya keselarasan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan di Provinsi Lampung. Sampai saat penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung belum melaksanakan musrenbang sektor perindustrian dan perdagangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rancangan awal RKP Tahun 2024, pemerintah pusat telah menyusun prioritas pembangunan nasional tahun 2024 yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun, sasaran makro pembangunan nasional selama tahun 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020 - 2024

Sasaran Dalam RPJMN 2020 - 2024	Indikator	Target Tahun 2024
Sasaran Makro	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7 – 6,0
	Rasio Gini (nilai)	0,360 – 0,374
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6 – 4,3
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0
	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	75,44
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,3

Sesuai dengan penjabaran diatas, Arahkan sektor perindustrian dan sektor perdagangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **Sektor Perindustrian**

Dalam RPJMN tahun 2020 – 2024, sektor perindustrian berada dalam agenda pembangunan/prioritas nasional Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Prioritas nasional ini memiliki 8 program prioritas, dimana sektor perindustrian berada dalam 4 program prioritas dengan setiap program prioritas memiliki kegiatan prioritas. Penjabaran dari keempat program prioritas yang menjadi arah bagi sektor industri adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas 5 : Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi. Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar.
 - KP 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
 - KP 4. Peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*.
2. Program Prioritas 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan, pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.
 - KP 2. Peningkatan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa
 - KP 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata
 - KP 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha dan digital
 - KP 6. Pengembangan Industri halal
3. Program Prioritas 7 : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) Dengan kegiatan prioritas :

- KP 1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa
 - KP 4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif
4. Program Prioritas 8 : Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dengan kegiatan prioritas :
- KP 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0
 - KP 4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata

- **Sektor Perdagangan**

Dalam RPJMN tahun 2020 – 2024, sektor perdagangan berada dalam agenda pembangunan/prioritas nasional Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Arah sektor perdagangan dalam program prioritas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas 5 : Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi. Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar.
 - KP 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
 - KP 4. Peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*.
2. Program Prioritas 6 : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Dengan kegiatan prioritas :
 - KP 1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa
 - KP 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor
 - KP 3. Pengelolaan impor
 - KP 4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif
 - KP 5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global

- KP 6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital
 - KP 7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi
3. Program Prioritas 8 : Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dengan kegiatan prioritas :
- KP 3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019 -2024 , Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, evaluasi capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 maupun perkiraan kinerja Tahun berjalan maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dijabarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	6,3
			2 Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	7,2

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
			3 Meningkatkan nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4 Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	≤ 2

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan.

Pada Renja tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mengusulkan akan melaksanakan 9 program, 19 kegiatan dan 48 Sub kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 23.377.395.943,60- guna mendukung target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Seluruh Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah disusun, rencananya akan dilaksanakan di 13 Kabupaten serta 2 kota yang terdapat di Provinsi Lampung serta di luar Provinsi Lampung.

Usulan ini telah mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024 serta telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2024. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian visi Gubernur Lampung yaitu **“Rakyat Lampung Berjaya”** dan mendukung misi ke – 5 yaitu **“Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan”**. Serta mendukung janji kerja Gubernur Lampung.

Selain untuk mendukung visi dan misi Gubernur Lampung, seluruh program, kegiatan, serta sub kegiatan yang disusun juga memperhatikan dan mengaokomodir *Sustainable Development Goal's*, Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan daerah tertinggal, Penyetaraan Gender, Pemberantasan Stunting di Provinsi Lampung,

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini kami menyajikan matrik/tabel rencana program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi, indikator, target dan prakiraan maju dari tiap program, kegiatan serta sub kegiatan pada renja tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 4.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN				19.666.760.943,60			4.735.000.000
3	URUSAN PENUNJANG				16.941.760.943,60			20.985.396.334
3.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	16.941.760.943,60		100%	20.985.396.334
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan		95%	319.980.000		95%	210.000.000
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	9 Dokumen	267.656.000	APBD	9 Dokumen	125.000.000
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Bandar Lampung	5 Dokumen	52.324.000	APBD	5 Dokumen	85.000.000
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan		100%	12.975.712.346,60		100%	16.952.396.334,38
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Bandar Lampung	112 Orang/Bulan	12.876.712.346,60	APBD	12 Bulan	14.603.396.334,38
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Bandar Lampung	12 Dokumen	29.000.000	APBD	12 Dokumen	2.279.000.000
3.30.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Bandar Lampung	1 Laporan	40.000.000	APBD	1 Laporan	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Bandar Lampung	12 Laporan	30.000.000	APBD	12 Laporan	30.000.000
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi BMD		100%	50.000.000		100%	50.000.000
3.30.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Bandar Lampung	2 Laporan	25.000.000	APBD	2 Laporan	25.000.000
3.30.01.1.03.06	Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Bandar Lampung	1 Laporan	25.000.000	APBD	1 Laporan	25.000.000
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian		100%	150.000.000		100%	100.000.000
3.30.01.1.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	Bandar Lampung	2 Unit	-	APBD	2 Unit	-
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Bandar Lampung	50 Orang	150.000.000	APBD	30 Orang	100.000.000
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	947.958.597		100%	1.023.000.000
3.30.01.1.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	35.000.000	APBD	1 Paket	35.000.000
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	252.938.597	APBD	1 Paket	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	Bandar Lampung	1 Paket	10.000.000	APBD	1 Paket	10.000.000
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Bandar Lampung	1 Paket	35.000.000	APBD	1 Paket	35.000.000
3.30.01.1.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan (Paket)	Bandar Lampung	2 Paket	75.000.000	APBD	1 Paket	268.000.000
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Bandar Lampung	20 Laporan	50.000.000	APBD	60 Laporan	50.000.000
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Dalam dan Luar Provinsi	70 Laporan	490.020.000	APBD	85 Laporan	375.000.000
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1.660.000.000		100%	2.025.000.000
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Bandar Lampung	1 Laporan	300.000.000	APBD	1 Laporan	375.000.000
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan (laporan)	Bandar Lampung	12 Laporan	1.360.000.000	APBD	12 Laporan	1.650.000.000
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan		15%	838.110.000		15%	625.000.000
3.30.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Bandar Lampung	12 Unit	578.110.000	APBD	16 Unit	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Bandar Lampung	1 unit	220.000.000	APBD	2 unit	200.000.000
3.30.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Bandar Lampung	53 Unit	40.000.000	APBD	60 Unit	75.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				75.000.000			100.000.000
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas		3 Kali	75.000.000		4 Kali	100.000.000
3.30.03.1.01.03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Provinsi Lampung	75 Orang	75.000.000		125 Orang	100.000.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu		5-5,5%	515.000.000		5- 5,5%	1.265.000.000
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan harga melalui sistem informasi		12 Laporan	440.000.000		12 Laporan	1.090.000.000
3.30.04.1.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 Laporan	90.000.000	APBD	1 Laporan	90.000.000
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Kab/Kota	1 Laporan	350.000.000	APBD	4 Laporan	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk		85%	75.000.000		90%	175.000.000
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	Kab/Kota	1 Laporan	75.000.000	APBD	1 Laporan	100.000.000
3.30.04.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Kab/Kota	1 Laporan	-	APBD	1 Laporan	75.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan yang memperoleh fasilitasi promosi dagang		10 Produk	600.000.000		10 Produk	1.350.000.000
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi promosi dagang		14 UKM	600.000.000		45 UKM	1.350.000.000
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Luar Negeri	4 Pelaku Usaha	-	APBD	4 Pelaku Usaha	450.000.000
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Luar Negeri	10 Pelaku Usaha	200.000.000	APBD	4 Pelaku Usaha	300.000.000
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha)	Bandar Lampung	150 Orang	400.000.000	APBD	125 Orang	600.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi		17,5%	1.160.000.000		20%	1.270.000.000
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen		1 Kegiatan	300.000.000		3 Kegiatan	360.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	Bandar Lampung	1 BPSK	275.000.000	APBD	1 BPSK	300.000.000
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	Bandar Lampung	1 LPKSM	25.000.000		1 LPKSM	30.000.000
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	Bandar Lampung	5 Pengaduan			5 Pengaduan	30.000.000
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu		1%	680.000.000		1%	780.000.000
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau (Komoditi)	Kab/Kota	6 Komoditi	293.950.000	APBD	6 Komoditi	80.000.000
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang (Dokumen)	Bandar Lampung	12 Dokumen	204.390.000	APBD	12 Dokumen	350.000.000
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan (Sertifikat)	Bandar Lampung	1750 Sertifikat	101.660.000	APBD	1955 Sertifikat	250.000.000
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	Bandar Lampung	10 Sertifikat	80.000.000	APBD	50 Sertifikat	100.000.000
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan		20%	180.000.000		20%	130.000.000
3.30.06.1.01.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	Kab/Kota	1 Laporan	150.000.000	APBD	35 Laporan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.06.1.01.03.02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani (kasus)	Bandar Lampung	1 Kasus	30.000.000	APBD	1 Kasus	30.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM/PKM unggulan/Potensial yang memperoleh fasilitasi pemasaran		10%	375.000.000		10%	750.000.000
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan		20%	200.000.000		20%	500.000.000
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM)	Kab/Kota	50 UMKM	200.000.000	APBD	35 UMKM	500.000.000
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang mendapatkan fasilitasi		20%	175.000.000		20%	250.000.000
3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Bandar Lampung	1 Laporan	100.000.000	APBD	1 Laporan	150.000.000
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab/Kota	1 Dokumen	75.000.000	APBD	1 Dokumen	100.000.000
31:02:00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Industri di Provinsi		0,5%	3.435.635.000		0,5%	4.400.000.000
31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Rata - rata capaian indikator kinerja dalam RPIP		90%	3.435.635.000		90%	4.400.000.000
31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Bandar Lampung	1 Dokumen	150.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	Bandar Lampung	1 Dokumen	370.000.000	APBD	1 Dokumen	500.000.000
31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Kab/Kota	2 dokumen	918.680.000	APBD	2 dokumen	500.000.000
31.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	Bandar Lampung	1 Dokumen	300.000.000	APBD	1 Dokumen	600.000.000
31.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	Kab/Kota	2 dokumen	1.646.955.000	APBD	2 dokumen	2.750.000.000
31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	Bandar Lampung	1 dokumen	50.000.000	APBD	1 dokumen	50.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait		25%	175.000.000		25%	400.000.000
3.31.03.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar		20 Rekomendasi	175.000.000		20 Rekomendasi	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Dokumen)	Kab/Kota	1 Dokumen	75.000.000	APBD	1 Dokumen	250.000.000
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi (dokumen)	Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	APBD	1 Dokumen	150.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS		45%	100.000.000		45%	100.000.000
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri		12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	100.000.000
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	Bandar Lampung	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	Bandar Lampung	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	50.000.000
TOTAL					23.377.395.943,60			30.620.396.334

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2024 diajukan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024 khususnya pada rencana kegiatan di Tahun 2024, prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2024 serta usulan kegiatan yang berasal dari musrenbang Kabupaten/Kota yang berkembang selama dilakukannya musyawarah perencanaan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung.

Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 maupun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini juga akan disesuaikan kembali dengan pagu anggaran yang tersedia dengan tetap mengacu kepada tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, prioritas pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, serta berbagai kebijakan yang berkembang selama proses penyusunan anggaran.